Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2014-2019)  
Alvira Rahmi Syafitri1  
Efendri2  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi  
Email : [alvira.jkt@gmail.com](mailto:sitirismaa97@gmail.com); [efendri@trilogi.ac.id](mailto:efendri@trilogi.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Indonesia. Variabel dependen diproksikan dengan belanja modal. Variabel independen diproksikan dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Variabel moderasi diproksikan dengan pertumbuhan ekonomi.

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga total sample menjadi 400 kabupaten/kota periode 2014-2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengujian hipotesis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan program STATA 16.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tingkat siginifikansi 0,278 > α 0,1 tidak berpengaruh terhadap belanja modal, 2) Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingkat siginifikansi 0,225 > α 0,1 tidak berpengaruh terhadap belanja modal, 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tingkat siginifikansi 0,000 < α 0,01 berpengaruh terhadap belanja modal, 4) Pertumbuhan ekonomi dengan tingkat siginifikansi 0,115 > α 0,1 tidak dapat memoderasi hubungan PAD terhadap belanja modal, 5) Pertumbuhan ekonomi dengan tingkat siginifikansi 0,081 > α 0,1 dapat memoderasi hubungan DAU terhadap belanja modal, 6) Pertumbuhan ekonomi dengan tingkat siginifikansi 0,026 > α 0,5 dapat memoderasi hubungan DAK terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); belanja modal; dan pertumbuhan ekonomi.

ABSTRACT

This research are known to find out the effects of Local Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund againts Capital Expenditure with Economic Growth as Variable of Moderation on Regency or City in Indonesia. Variable of Dependent are proxies along Capital Expenditures. Variable of Independent are proxies along Local Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund . Variable of Moderation are proxies along Economic Growth.

Based on this research to find out population of Regency or City in Indonesia are using Purposive Sampling which succesfully collected by the amount of 400 Samapbnple of Regency or City in between of 2014 until 2019. Type of Data which is used for needs of research are secondary data are either Local Government Budget. Hypotesist testing are using Moderated Regression Anyalysis (MRA) and using Program of STATA 16.

The result of this research are 1) Local Revenue level of significance 0,278 > α 0,1 are not effected againts Capital Expenditures. 2) General Allocation Fund level of significance 0,225 > α 0,1 are not effected againts Capital Expenditures, 3) Special Allocation Fund level of significance 0,000 > α 0,01 are effected againts Capital Expenditure, 4) Economic Growth level of significance 0,115 > α 0,1 not eligible to moderate a connection between Local Revenue and Capital Expenditure, 5) Economic Growth level of significance 0,081 > α 0,1 are eligible to moderate a connection between General Allocation Fund and Capital Expenditure, 6) Economic Growth level of significance 0,026 > α 0,5 are eligible to moderate and to amplify a connection between Special Allocation Fund and Capital Expenditure.

Keywords: Capital Expenditure; Local Revenue; General Allocation Fund, Special Allocation Fund; and Economic Growth.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola sumberdaya daerahnya masing-masing secara otonom. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenangnya pada pemerintah daerah, daintaranya adalah tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014).

Dalam melaksanakan realisasi anggaran keuangan daerah perlu memperhatikan peraturan pemerintah. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan faktor ekonomis, efisiensi dan efektifitas dari kegiatan tersebut. Pemerintah pusat berkewajiban untuk memonitor kegiatan tersebut dengan menyusun bagaimana mengelola keuangan

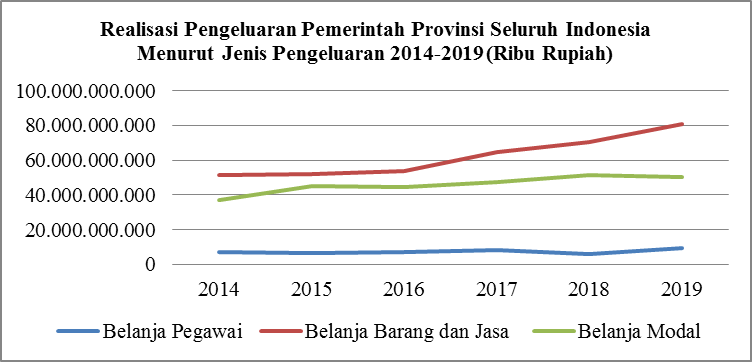
daerah dalam bentuk Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Pasal 50 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) untuk mecapai tujuan yang telah di tetapkan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam

pelaksanaan pelayanan publik. Salah satu bentuk alokasi dana yaitu belanja modal. Belanja modal sebagai bagian dari belanja daerah untuk membangun dan menyediakan sarana prasarana, infrastruktur serta fasilitas publik melalui pembelian barang berwujud dalam bentuk aset tetap dengan manfaat lebih dari satu tahun (Standar Akuntansi Pemerintah, SAP).

Gambar 1

Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia



Berdasarkan klasifikasi belanja permasalahan yang terjadi pemerintah memfokuskan pada belanja barang dan jasa (BPS, 2020), sehingga belanja modal masih lebih rendah (kecil) dibandingkan dengan belanja barang. Belanja modal memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah daerah masih kurang diperhatikan, menurut Purnama (2014) selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin seperti belanja barang dan jasa atau belanja pegawai sehingga menyebabkan ketimpangan keuangan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pemendagri No. 13 Tahun 2006) sehingga setiap belanja tersebut memiliki dampak yang berbeda-beda.

Pengalokasian anggaran belanja modal harus dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah menurut Juniawan dan Suryantini (2018) dalam meningkatkan pelayanan publik belanja modal merupakan salah satu langkah untuk memenuhi desentralisasi fiskal. Faktor kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah, yang diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan. Menurut Masruroh (2018) pentingnya membayar pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu adanya kinerja keuangan daerah yang baik, yang nantinya digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial masyarakat.

Rata-rata alokasi belanja modal masih di kisaran 20 persen dari APBD (BPS, 2020). Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal minimal 29% dari belanja daerah sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2018 mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal minimal 23% dari belanja daerah. Peraturan tersebut berbeda dengan kondisi belanja daerah di Indonesia saat ini.

Pembangunan daerah melalui belanja modal membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik. Ketimpangan keuangan yang disebabkan tidak meratanya belanja modal kabupaten dan kota di Indonesia harus memperhitungkan belanja modal untuk keberlangsungan pembangunan sarana prasarana, infrastruktur dan fasilitas publik. Penerimaan daerah berupa PAD, DAU dan DAK akan meningkatkan perekonomian daerah melalui pembangunan sehingga meningkatkan belanja modal daerah (Juniawan dan Suryantini, 2018).

Perekonomian di suatu daerah didukung sarana prasarana publik dan infrastruktur melalui belanja modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum tercermin pada pendapatan per kapitanya. PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu daerah yaitu pertumbuhan ekonomi (Adisasmita, 2014: 91). Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang yang juga mempunyai pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan dalam kondisi baik ditengah persaingan global. Dilansir dalam money.kompas.com, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,27 persen pada kuartal II-2018 secara tahunan sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh PAD, DAU, DAK pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya meningkatkan PAD, DAU, DAK dan belanja modal (Jaeni & Anggana, 2016).

TINJAUAN PUSATAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat dengan adanya produksi barang dan jasa yang bertambah sehingga terdapat perkembangan kegiatan dalam perekonomian dengan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Menurut Sukirno, 1996 pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang (Romandhani, 2020).

Keberhasilan pembangunan merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta menjadi bahan perencanaan pembangunan di masa yang datang. Menurut Saad, 2009 mengungkapkan pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal, menyediakan perumahan dengan biaya rendah, melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian (Romandhani, 2020).

Belanja Modal

Belanja modal digunakan dalam pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna membeli dan pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujd yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya (Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) sebagai pembentukan modal.

Belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung yang termasuk ke dalam belanja daerah serta didanai oleh pendapatan daerah, sehingga besar kecilnya pendapatan daerah akan mempengaruhi belanja modal (Pasal 50 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dari pengertian tersebut belanja modal sebagai pembentukan modal yang memiliki sifat menambah aset tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi termasuk pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aset serta sebagai biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah atau mempertahankan masa manfaat.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) dengan tujuan memberikan hak kepada daerah untuk dapat menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan asas desentralisasi. Menurut Nasir (2019) menerangkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber pembiayaan asli daerah melalui pungutan yang diatur oleh peraturan daerah.

Sumber pendapatan asli daerah menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD dapat di gali sesuai dengan kemampuan derah dengan mempertimbangkan sumber-sumber PAD lainnya. Dapat disimpulkan PAD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah sendiri sehingga dapat digunakan dan digali sesuai dengan potensinya masing-masing.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (Pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005). Menurut Aziz (2012), DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada kabupaten dan kota dengan tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

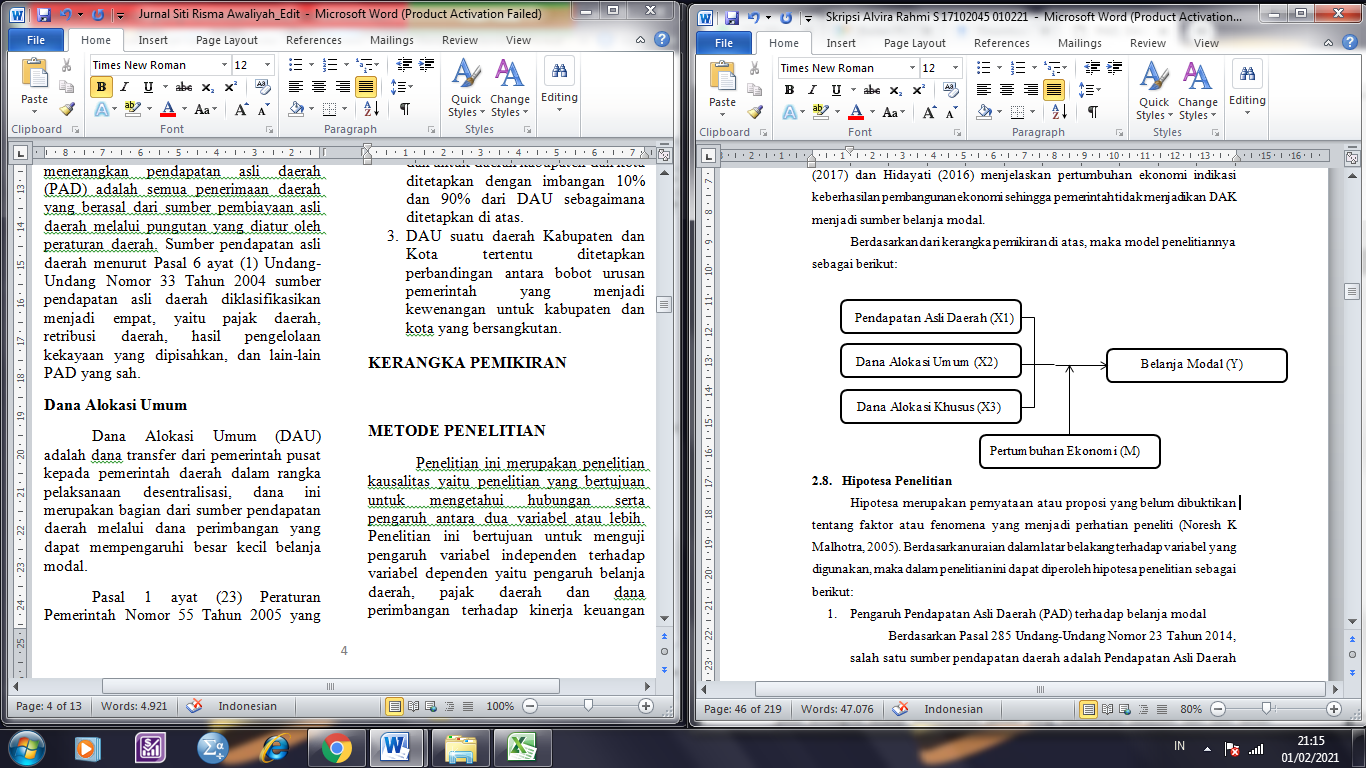
Dari setiap definisi tersebut tentang Dana Alokasi Umum (DAU) maka dapat disimpulkan DAU adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana ini merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah melalui dana perimbangan yang dapat mempengaruhi besar kecil belanja modal.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer pemerintah yang juga merupakan bagian dari dana perimbangan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 ayat (24) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005) khususnya memperbaiki kerusakan infrastruktur. Besarnya DAK ditentukan setiap tahun dalam APBN. Daerah penerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian minimal 10% dari DAK yang ditransfer ke daerah (Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005) dana penyesuaian tersebut harus dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 2

Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan pada kabupaten/kota di Indonesia periode 2014–2019 dengan 6 tahun observasi menggunakan alat bantu aplikasi STATA 16.

Kriteria penarikan sampel dalam penelitian ini memiliki Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah kabupaten dan kota tahun 2014-2019, Produk Domestik Bruto (PDRB) atas Harga Berlaku 2010 menurut kabupaten dan kota tahun 2014-2019 dan memiliki data lengkap Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 400 kabupaten/kota selama 6 tahun. Total jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 2.400 kabupaten/kota.

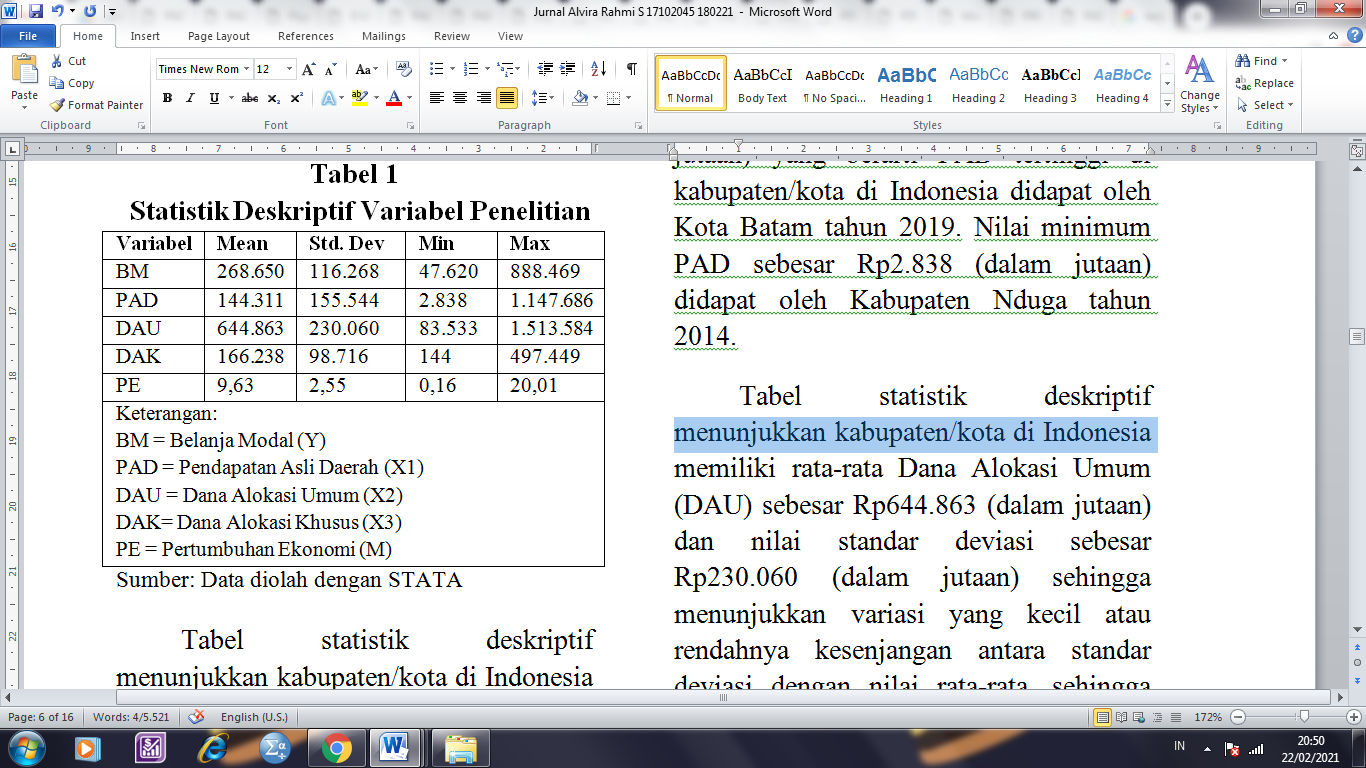
PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi rata-rata, standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimum dan jumlah data penelitian. Berikut ini hasil analisis statistik deskriptif data pada masing-masing variabel.

Tabel 1

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian



Sumber: Data diolah dengan STATA

Tabel statistik deskriptif menunjukkan kabupaten/kota di Indonesia memiliki rata-rata belanja modal sebesar Rp268.650 (dalam jutaan) dan nilai standar deviasi sebesar Rp116.268 (dalam jutaan) sehingga menunjukkan variasi yang kecil atau rendahnya kesenjangan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata, sehingga simpangan data pada variabel belanja modal ini dapat dikatakan baik. Nilai maksimum sebesar Rp888.469 (dalam jutaan) yang berarti belanja modal tertinggi di kabupaten/kota di Indonesia didapat oleh Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Nilai minimum belanja modal sebesar Rp47.620 (dalam jutaan) didapat oleh kabupaten Kabupaten Banggai Laut tahun 2014.

Tabel statistik deskriptif menunjukkan kabupaten/kota di Indonesia memiliki rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp144.311 (dalam jutaan) dan nilai standar deviasi sebesar Rp155.544 (dalam jutaan) sehingga menunjukkan variasi yang besar atau tingginya kesenjangan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata, sehingga simpangan data pada variabel PAD ini dapat dikatakan kurang baik. Nilai maksimum sebesar Rp1.147.686 (dalam jutaan) yang berarti PAD tertinggi di kabupaten/kota di Indonesia didapat oleh Kota Batam tahun 2019. Nilai minimum PAD sebesar Rp2.838 (dalam jutaan) didapat oleh Kabupaten Nduga tahun 2014.

Tabel statistik deskriptif menunjukkan kabupaten/kota di Indonesia memiliki rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp644.863 (dalam jutaan) dan nilai standar deviasi sebesar Rp230.060 (dalam jutaan) sehingga menunjukkan variasi yang kecil atau rendahnya kesenjangan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata, sehingga simpangan data pada variabel DAU ini dapat dikatakan baik. Nilai maksimumsebesar Rp1.513.584 (dalam jutaan) yang berarti DAU tertinggi di kabupaten/kota di Indonesia didapat oleh Kabupaten Deli Serdang tahun 2019. Nilai minimum DAU sebesar Rp83.588 (dalam jutaan) didapat oleh Kabupaten Pasuruan tahun 2014.

Tabel statistik deskriptif menunjukkan kabupaten/kota di Indonesia memiliki rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp166.238 (dalam jutaan) dan nilai standar deviasi sebesar Rp98.716 (dalam jutaan) sehingga menunjukkan variasi yang kecil atau rendahnya kesenjangan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata, sehingga simpangan data pada variabel DAK ini dapat dikatakan baik. Nilai maksimum sebesar Rp497.449 (dalam jutaan) yang berarti DAK tertinggi di kabupaten/kota di Indonesia didapat oleh Kabupaten Bantaeng tahun 2016. Nilai minimum DAK sebesar Rp144 (dalam jutaan) didapat oleh Kota Cilegon tahun 2014.

Tabel statistik deskriptif menunjukkan kabupaten/kota di Indonesia memiliki rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 9,63% dan nilai standar deviasi sebesar 2,55% sehingga menunjukkan variasi yang kecil atau rendahnya kesenjangan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata, sehingga simpangan data pada variabel PE ini dapat dikatakan baik. Nilai maksimumsebesar 20,01% yang berarti PE tertinggi di kabupaten/kota di Indonesia didapat oleh Kabupaten Cilacap tahun 2016. Nilai minimum PE sebesar 0,16% didapat oleh Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015.

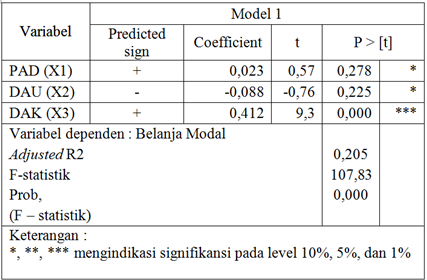
Pendekatan Model Estimasi Data Panel

Pada penelitian ini dilakukan pemilihan model estimasi dengan tiga cara yaitu *random effect*, *fixed effect* dan *pooled least square*. Pengujian dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman yang tertera pada lampiran 3. Setelah melakukan Uji Chow dan Uji Hausman pada 4 model yaitu tanpa moderasi dan dengan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi model yang paling baik digunakan adalah *fixed effect*.

### PEMBAHASAN

Tabel 2

Hasil Regresi Tanpa Moderasi



Sumber: Data diolah dengan STATA

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2, hasil uji F 0,000 < 0,05. Nilai *adjusted* R2 sebesar 0,205, artinya bahwa variabel independen (PAD, DAU dan DAK) dapat menjelaskan variabel dependen (BM) sebesar 20,5%, sedangkan sisanya sebesar 79,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,278. Nilai signifikansi tersebut bernilai > 0,1 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,023, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia, sehingga H0 ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan Waskito, Zuhrotun & Rusherlisyani (2019), Prasetya (2017), Hidayati (2016) dan Mahadika & Riharjo (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berbeda dengan penelitian Sularno (2013), Permatasari (2016) dan Masruroh (2018) serta Juniawan dan Suryantini (2018) yang menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Perbedaan hasil ini disebabkan pada analisis deskriptif menunjukkan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penelitian memiliki rata-rata PAD sebesar Rp144.311 (dalam jutaan), dengan nilai maksimum sebesar sebesar Rp1.147.686 (dalam jutaan) terdapat di Kota Batam tahun 2019 dengan Rp.3.806.358 dan nilai minimum PAD sebesar Rp2.838 (dalam jutaan) didapat oleh Kabupaten Nduga tahun 2014 dengan UMK Rp1.900.000. Perbedaan nilai PAD yang sangat jauh dapat menyebabkan perubahan tingkat signifikansi terhadap belanja modal. Menurut Pasal 15 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 kemampuan pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap APBD di suatu daerah sehingga kurangnya sumber-sumber penerimaan PAD akan berdampak pada rencana kegiatan pada tahun berjalan.

Proposi belanja modal yang relatif kecil mengindikasi bahwa PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lain, seperti belanja rutin, belanja operasional dan khususnya belanja barang/jasa. Menkeu menyatakan anggaran APBD pada tahun 2019 belanja barang dan jasa dan perjalanan dinas sebesar 13,4% serta belanja jasa kantor 17,5% sedangkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat masih bergantung pada pemerintah pusat kondisi ini mencerminkan keuangan negara berkembang.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,225. Nilai signifikansi tersebut bernilai > 0,1 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,088, artinya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia, sehingga H0 ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012), Sularno (2013), Prasetya (2017), dan Verawaty, Merina & Sari (2015) menyatakan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. penelitian ini berbeda dengan penelitian Permatasari & Mildawati (2016), Pradana & Handayani (2017), Masruroh (2018), dan Mahadika & Riharjo (2019) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Perbedaan hasil ini disebabkan pada rata-rata kabupaten/kota di Indonesia pada periode penelitian memiliki proposi DAU yang terus meningkat dengan penurunan yang relatif kecil, DAU yang bersifat *block grant* penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk kebutuhan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa proposi DAU yang besar pada kabupaten/kota di Indonesia pada periode penelitian yang di dukung dengan pendapatan dalam negeri dan pengeluaran rutin berupa belanja pegawai yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 sehingga DAU yang diterima hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal. Hasil yang di peroleh mengindikasi DAU digunakan untuk membiayai belanja rutin seperti belanja pegawai.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut bernilai < 0,01 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,412, artinya variable Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia artinya semakin tinggi DAK maka akan meningkatkan belanja modal, sehingga H0 diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Novianto & Hanafiah (2015), Sugiyanta (2016), Permatasari & Mildawati (2016) dan Pradana & Handayani (2017), dan Waskito, Zuhrotun & Rusherlisyani (2019) yang menjelaskan terdapat keterkaitan antara DAK dengan belanja modal. Tetapi berbeda dengan Setiawan (2015), Verawaty, Merina & Sari (2015), Prasetya (2017) serta Rahmawati & Tjahjono (2018) menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

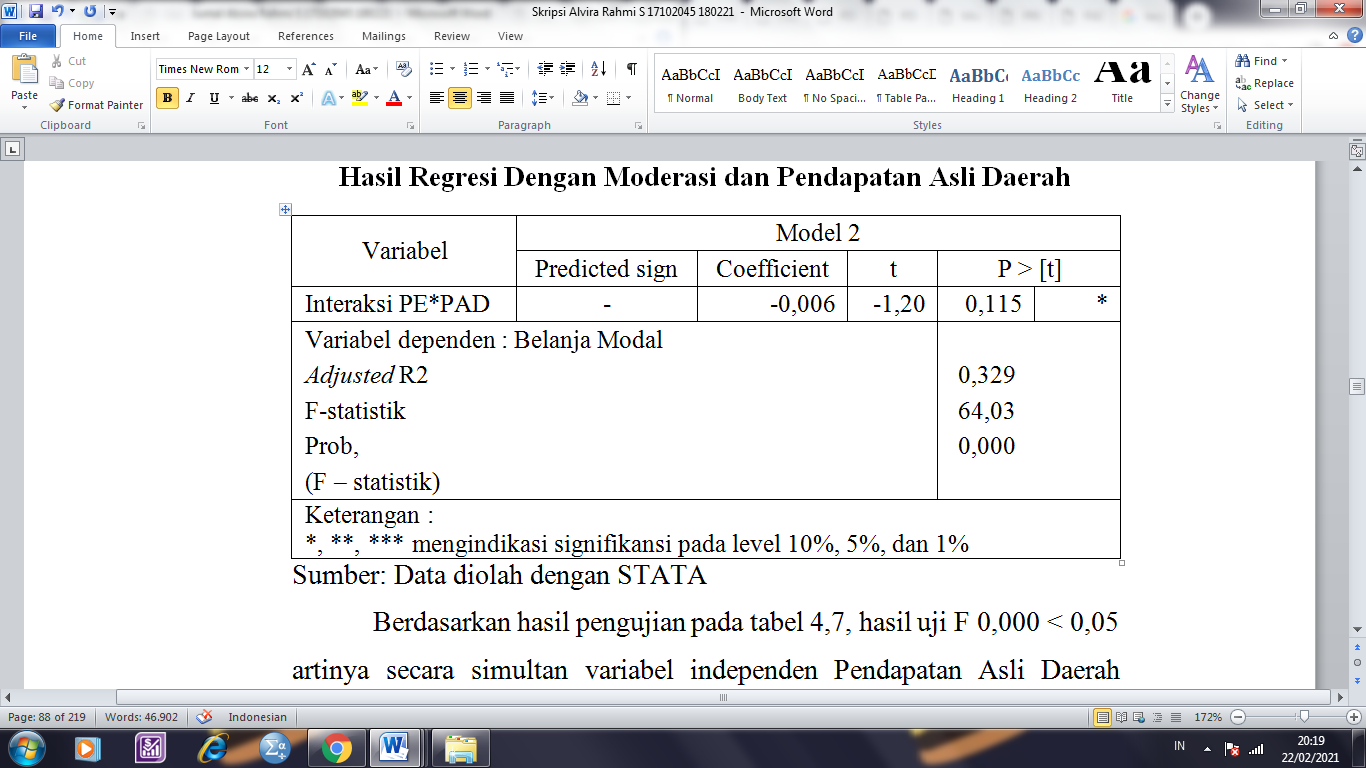
Persentase DAK yang diterima daerah mempengaruhi belanja daerah salah satunya untuk meningkatkan belanja modal. Di beberapa daerah, DAU yang diperoleh bernilai kecil dan tidak mencukupi untuk pembiayaan kegiatan ekonomi, oleh sebab itu DAK digunakan untuk menutupi kekurangannya.

Pada penelitian ini sebagian besar DAK pada kabupaten/kota di Indonesia periode penelitian masih mengandalkan pemerintah pusat untuk mendanai pelayanan publik melalui belanja modal dengan meningkatkan infrastruktur pendidikan, akses serta pelayanan kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pemerintah desa, dan sarana prasarana kawasan. Dalam penelitian ini semakin besar DAK maka akan meningkatkan belanja modal untuk pendanaan pelayanan publik melalui pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang merupakan program nasional pemerintah daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Tabel 3

Hasil Regresi Dengan Moderasi dan Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data diolah dengan STATA

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3, hasil uji F 0,000 < 0,05. Nilai *adjusted* R2 sebesar 0,329 artinya bahwa variabel independen PAD dan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan variabel dependen belanja modal sebesar 32,9%, sedangkan sisanya sebesar 67,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,115 > 0,1 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,006. Maka hal ini menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal dengan intensitas berlawanan, sehingga H0 ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan Verawaty, Merina & Sari (2015), Hidayati (2016), Pratama (2017), dan Cahyaning (2018) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan PAD terhadap alokasi belanja modal, sedangkan Menurut penelitian Sugiarthi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara PAD dengan pengalokasian belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan. Hal ini berbeda dengan penelitian Jaeni & Anggana (2016), Alfasadun (2017), Masruroh (2018) serta Mahadika & Riharjo (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi secara memperkuat hubungan antara PAD dengan pengalokasian belanja modal.

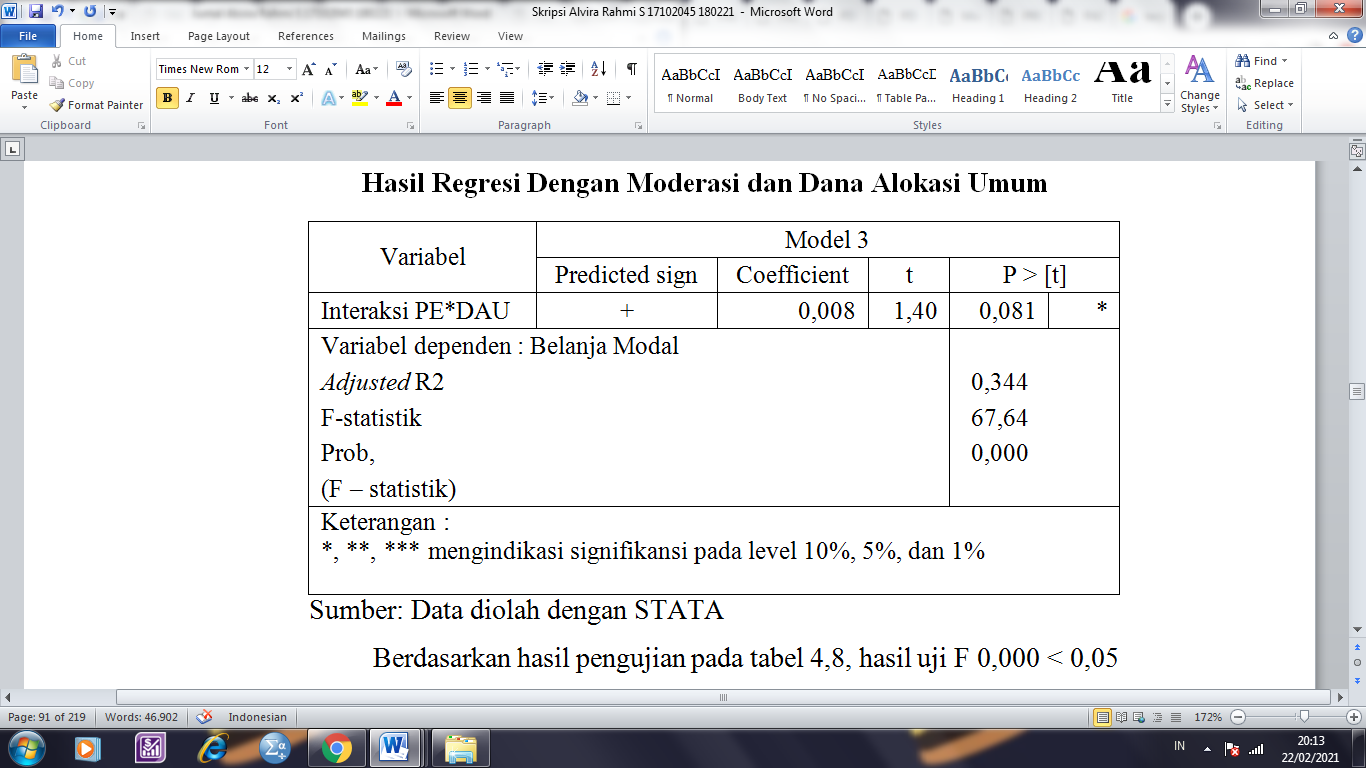
Menurut Pasal 15 Peraturan Menteri dalam Negeri No, 13 Tahun 2006 kemampuan pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap APBD di suatu daerah sehingga peningkatan belanja modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya antara lain melalui PAD.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Indonesia pada periode penelitian mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah tidak maksimal dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi karena terdapat program Yng kurang tepat sasaran seperti pendidikan, aspek sosial, kesehatan, ekonomi yang baik. Dalam penelitian ini PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lain seperti seperti belanja rutin, belanja operasional dan belanja barang/jasa sehingga membuat pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi faktor penentu hubungan PAD terhadap belanja modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Tabel 4

Hasil Regresi Dengan Moderasi dan Dana Alokasi Umum



Sumber: Data diolah dengan STATA

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4,8, hasil uji F 0,000 < 0,05. Nilai *adjusted* R2 sebesar 0,344, artinya bahwa variabel independen DAU dan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan variabel dependen belanja modal sebesar 34,4%, sedangkan sisanya sebesar 65,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0,81 < 0,1 dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,003. Maka hal ini menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal, sehingga H0 diterima.

Penelitian ini sejalan dengan Hidayati (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi secara memperkuat hubungan DAU terhadap belanja modal, sedangkan penelitian Sugiarthi & Supadmi (2014) dan Masruroh (2017), dan Mohklas & Purwati (2019) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi memoderasi namun memperlemah hubungan DAU terhadap belanja modal. Penelitian ini sangat berbeda dengan Pratama (2017) yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi tidak dapat memperkuat pengaruh DAU terhadap belanja modal.

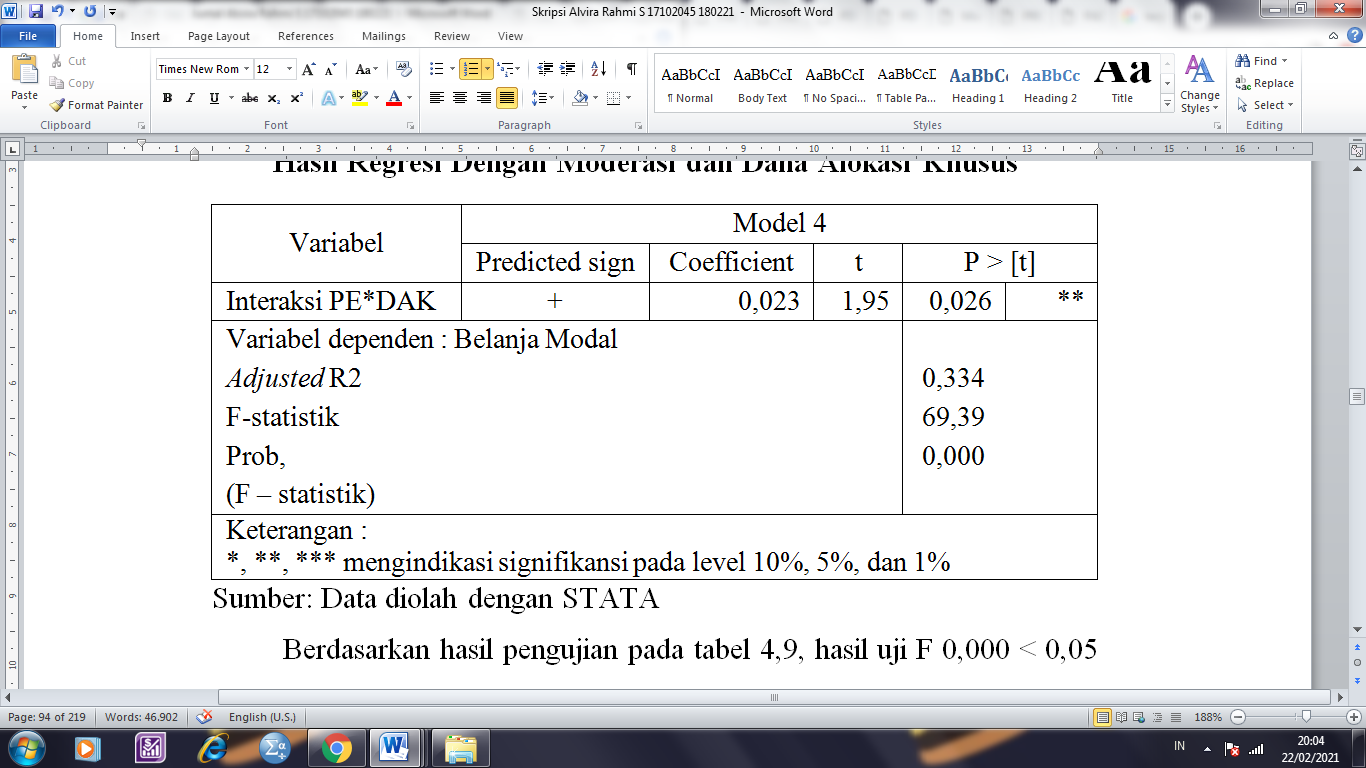
Pemerintah daerah masih membutuhkan bantuan pemerintah pusat berupa DAU untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendanai pembangunan daerah. pertumbuhan ekonomi yang baik pada kabupaten/kota di Indonesia akan mempengaruhi pembangunan daerah namun hal ini tidak menjadi faktor penentu hubungan DAU terhadap belanja modal, sebab masing-masing variabel memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Kebijakan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur publik.

Pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah menggambarkan adanya tenaga kerja yang mengurangi tingkat pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah mempengaruhi pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya DAU terhadap belanja modal. Menurut Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa DAU komponen dana perimbangan yang menjadi sumber pendanaan belanja salah satunya belanja modal. Dapat disimpulkan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh DAU pada belanja modal semakin meningkat.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Tabel 5

Hasil Regresi Dengan Moderasi dan Dana Alokasi Khusus



Sumber: Data diolah dengan STATA

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5, hasil uji F 0,000 < 0,05. Nilai *adjusted* R2 sebesar 0,334 artinya bahwa variabel independen DAK dan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan variabel dependen belanja modal sebesar 33,4%, sedangkan sisanya sebesar 66,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,026 < 0,5 dan nilai koefisien regresi sebesar positif 0,023. Maka hal ini menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal. Dapat dijelaskan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memoderasi secara memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal yang artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh PAD pada belanja modal semakin meningkat, sehingga H0 diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putro, 2010), Mohklas & Purwati (2019) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi secara memperkuat hubungan antara DAK terhadap belanja modal.

Penggunaan DAK ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada publik melalui pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana prasarana fisik yang mempunyai jangka waktu ekonomis yang panjang. Semakin besar pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah yang baik dengan peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal, menyediakan perumahan dengan biaya rendah. Pada kabupaten/kota di Indonesia tahun penelitian menggambarkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan hubungan DAK terhadap belanja modal. Setiap variabel pada penelitian ini memiliki fungsi dan tujuan yang sejalan, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja modal atau aset tetap lainnya.

KESIMPULAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014-2019.

Perbedaan nilai PAD yang sangat jauh dapat menyebabkan perubahan tingkat signifikansi terhadap belanja modal. Proposi belanja modal yang relatif kecil ini mengindikasi bahwa PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lain seperti belanja rutin/belanja operasional selain itu, peningkatan anggaran belanja modal tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah.

1. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014-2019.

DAU yang bersifat block grant dengan kata lain penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk kebutuhan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Hasil yang di peroleh mengindikasi DAU digunakan untuk belanja rutin seperti belanja pegawai yang didukung oleh Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03.

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014-2019.

Penerima besar kecil DAK mempengaruhi belanja daerah salah satunya untuk meningkatkan belanja modal. Di beberapa daerah, DAU yang diperoleh bernilai kecil dan tidak mencukupi untuk pembiayaan kegiatan ekonomi, oleh karena itu sebagian DAK digunakan untuk menutupi kekurangannya. Sehingga semakin besar DAK maka akan meningkatkan belanja modal untuk pendanaan pelayanan publik melalui pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang merupakan program nasional pemerintah daerah.

1. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014-2019.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Indonesia pada periode penelitian mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga membuat kinerja pemerintah daerah tidak maksimal. Dalam penelitian ini PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lain seperti belanja pegawai atau belanja barang dan jasa sehingga membuat pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi faktor penentu hubungan PAD terhadap belanja modal.

1. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014-2019.

Pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah menggambarkan adanya tenaga kerja yang mengurangi tingkat pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat bertambah yang berdampak pada pembangunan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya DAU terhadap belanja modal.

1. Pertumbuhan ekonomi memoderasi secara memperkuat hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014-2019, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh DAK pada belanja modal semakin meningkat. Setiap variabel pada penelitian ini memiliki fungsi dan tujuan yang sejalan, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat terus melakukan perbaikan dan meningkatkan fasilitas publik baik infrastruktur, jalan, air, bangunan dan lainnya serta dapat menentukan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan untuk fasilitas publik yang lebih baik pada pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat lebih mengetahui informasi mengenai pembangunan daerah terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Indonesia sebagai alat mensejahterakan.

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk penelitian selanjutnya menekan kembali variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di indonesia dan menambahkan periode penelitian serta variabel-variabel lain seperti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Dana Bagi Hasil (DBH) dan jumlah penduduk yang diduga dapat mempengaruhi belanja modal sehingga output yang dihasilkan dapat memberikan akurasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

*Badan Pusat Statistik (BPS)*. (2020). Diambil kembali dari www.bps.go.id

*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. (2020). Diambil kembali dari www.djpk.kemenkeu.go.id

Adisasmita, R. (2014). Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Cahyaning, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, Vol 3*(No 1).

Endah Purbarini; Gregorius N. Masdjojo. (2015, Juni). Flypaper Effect on Operating Expenditure and Capital. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 16*(No. 1), 75-84.

Hidayati, N. (2016). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya; A.A.N.B. Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 79-92.

Indraningrum, T. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Isti Permatasari; Titik Mildawati. (2016, Januari). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Riset Akuntansi, Vol 5*(1).

Jaeni; Greg. Anggana L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK.* Semarang: Unisbank Semarang.

Karyadi, S. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Kusnandar; Dodik Siswantoro. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.

Made Ari Juniawan; Ni Putu Santi Suryantini. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7*(No. 3), 1255-1281.

Masruroh, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur. *Simki-Economic , Vol. 2*(No. 1).

Mohklas; Devi Inanta Purwati. (2019). Memoderasikah Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016). *Vol 2*(1).

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Vol. 2*(No. 1), 30-45.

Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiarthi; Ni Luh Supadmi. (2014). Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. 477-495.

Permatasari, I. (2016, Januari). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5*(No. 1).

Prasetya, I. (2017, Agustus). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Purbarini; Gregorius N. Masdjojo. (2015, Juni). Flypaper Effect on Operating Expenditure and Capital. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 16*(No. 1), 75-84.

Riko Novianto; Rafiudin Hanafiah. (2015, Januari-Juli). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi, Vol. 4*(No.1).

Riska Rahmawati; Achmad Tjahjono. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di D.I Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Jurnal Kajian Bisnis, Vol. 26*(N0.2), 195-209.

Romandhani, N. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2018. *Skripsi.* Jakarta: Universitas Gunadarma.

Setiawan, D. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah ( Tahun 2012 ). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyanta. (2016, Juni 1). Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Vol. 14*(No. 1).

Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sularno, F. M. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi.* Bandung: Universitas Widyatama.

Verawaty; Citra Indah Merina; Mela Sari. (2015). Determinan Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia.

Waskito; Zuhrotun; Rusherlisyani. (2019, Desember). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 3*(No. 2), 220-238.

Yosea Eka Pradana; Nur Handayani. (2017, Maret). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 6*(No. 3).

Yovita, F. M. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010). *Skripsi.* 2011: Universitas Diponegoro.*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*